RENCANA AKSI TAHUN 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Presentase Rata- Rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan sasaran SKPD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu**	100	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dari segi waktu, kualitas, dan kuantitas	Sekretaris
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu***	100	Memuat jadwal penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Sekretaris
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	6		
	Meningkatnya Sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Presentase Temuan Anggaran yang ditindak lanjuti	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja	3		
	Meningkatnya Sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat daerah	2		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu***	100	Penguatan ketaatan peraturan penatausahaan keuangan, ketepatan waktu pembayaran	Sekretaris
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	17		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	16		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	11		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu***	100	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tepat waktu dengan melakukan stock opname berkala	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya***	100	Penyusunan, pemenuhan dan kelengkapan dokumen kepegawaian	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran***	100	Penyediaan barang kebutuhan kantor di awal tahun dan penyusunan angkas dan kebutuhan per triwulan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah***	100	Pengadaan barang dengan memperhatikan urgensi	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran***	100	Penyediaan barang kebutuhan kantor dan kebutuhan pemeliharaan BMD di awal tahun dan penyusunan angkas dan kebutuhan per triwulan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara***	100		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	16		
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantro dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1		
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15		
2	Meningkatnya Ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	10	Penguatan , pembinaan serta sosialisasi tentang Ideologi Pancasila kepada masyarakat	Kepala Bidang Ideologi Pancasila dan Kewaspadaan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Persentase Peningkatan Penanganan Konflik**	3	mulai dari kalangan anak-anak, remaja/pelajar,mahasiswa, dan tokoh masyarakat untuk menumbuhkan karakter yang berpedoman kepada Ideologi Pancasila dan cinta tanah air.	Nasional
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1		
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	220		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100		
			Monitoring Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1		
	Meningkatnya Ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik**	20	Pendidikan dan Pembinaan tentang Politik dan budaya politik di lingkungan masyarakat melalui Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang mandiri dan kritis, mendorong masyarakat yang sadar politik, mengubah pola pikir, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu serta meminimalkan konflik di tengah masyarakat.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah pemilih pemula yang dibina	510		
			Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah dokumen program kerja di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun	1		
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun	1		
			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	150		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	54		

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1		
	Meningkatnya Ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang Ber SKT**	2	Pembinaan dan pembentukan Organisasi masyarakat agar menjadi organisasi yang membawa anggotanya ke arah yang lebih baik dan berdaya, memiliki kekuasaan dan pengetahuan serta kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik lagi dan mandiri.	Kepala Bidang Kemasyarakatan dan Ketahanan Bangsa
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	***Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina***	40		
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1		
			Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80		
			Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	155		
			Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3		
	Meningkatnya Ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Prosentase Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Aktif**	20	Peningkatan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan masyarakat dengan melakukan soisalisasi untuk menumbuhkan karakter yang produktif dan aktif menciptakan lapangan kerja dengan tetap memperhaikan budaya yang ada.	Kepala Bidang Kemasyarakatan dan Ketahanan Bangsa
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	***Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif***	85		
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1,000		
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1		

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Kelahanan dan Ketahanan wilayah	Pemantaan penurunan konflik di Kota Pasuruan	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Prosentase Konflik yang dimediasi**	75	Peningkatan upaya-upaya pencegahan terjadinya konflik di masyarakat serta fasilitasi penanganan konflik. Upaya-upaya tersebut meliputi : 1. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat. 2. Membangun persatuan dan kesatuan. 3. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. 4. Meredam potensi konflik, Membangun sistem peringatan dini.	Kepala Bidang Ideologi Pancasila dan Kewaspadaan Nasional
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	***Persentase Peningkatan Penanganan Konflik***	3		
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1		
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	3		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	289		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10,715		
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yaitu melaksukan kegiatan pemantauan orang asing, TKA asing dan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2		

Mengetahui,
Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa & Politik
Kota Pasuruan

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SUHAMARDI UTOYO, S.Si
NIP. 196408171993031013